

**SKRIPSI**

**GARIS KETURUNAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA  
BINUANG KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

**Disusun Dan Diajukan Oleh :**

**RINI ANGGRIANI SYUKRI**

**E111 14 505**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

GARIS KETURUNAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BINUANG  
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU

Yang diajukan oleh :

**RINI ANGGRIANI SYUKRI**

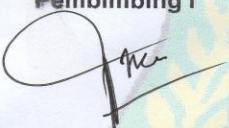
**E111 14 505**

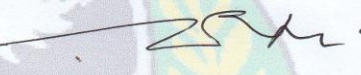
Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Pada tanggal Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Makassar, Juni 2021

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si  
NIP.19730813 199802 2 001

  
A. Naharuddin, S.IP, M.Si  
NIP.19731122 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik

  
Drs.H. Andi Yakub, M.Si P.hD  
NIP.196212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**GARIS KETURUNAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA  
BINUANG KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diajukan oleh:

**Rini Anggriani Syukri**

**E11114505**

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Makassar, 12 Juli 2021

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

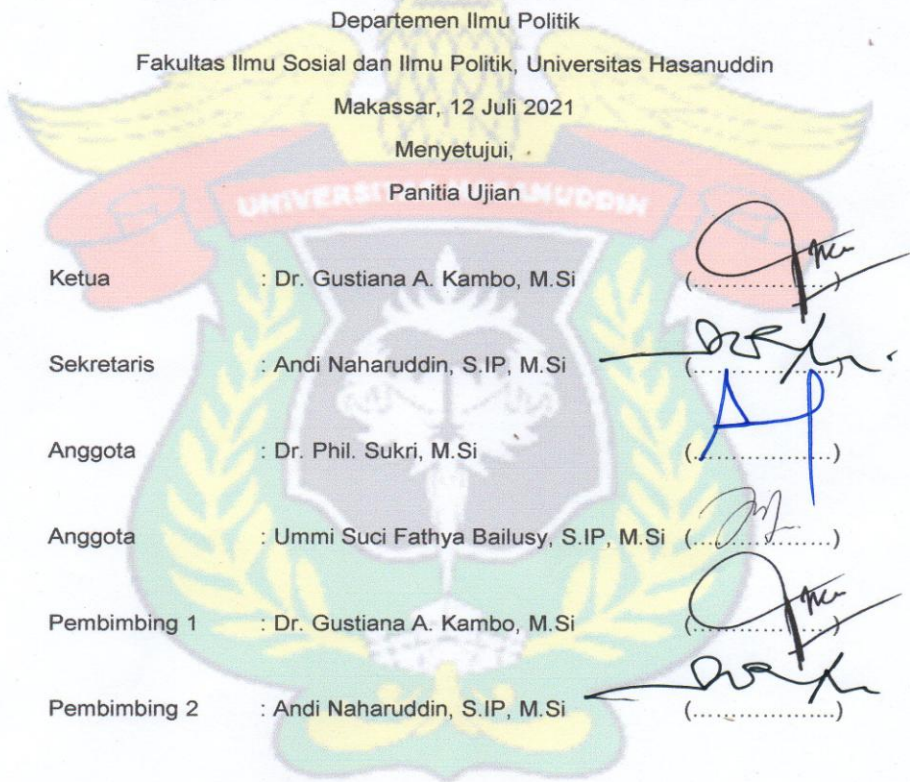
Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si

Anggota : Dr. Phil. Sukri, M.Si

Anggota : Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si

Pembimbing 1 : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

Pembimbing 2 : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rini Anggriani Syukri

NIM : E11114505

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Garis Keturunan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Binuang Kecamatan**

**Balusu Kabupaten Barru**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2021

Yang menyatakan



Rini Anggriani Syukri

## KATA PENGANTAR



Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, penulis memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan serta kuasa yang tiada batas kepada penulis, serta sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan dari hati yang paling dalam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Muh. Syukri dan Ibu Hj.Rosdiana Alang yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta dan pengorbanan keringat dan air mata. Untaian doa serta pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun penulis tidak akan bisa membalasnya. Keselamatan dunia dan akhirat semoga selalu untukmu. Melalui penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak

terhingga serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis, antara lain kepada:

1. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dwi Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS, Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku wakil Dekan II FISIP UNHAS, dan Bapak Dr. Hasrullah, M.A selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS.
4. Bapak Dr. H. Andi Yakub, M.Si Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Bapak Ali Armunanto, S.IP, M.Si selaku Sekertaris Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.
5. Terkhusus kepada bapak dan ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik : Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (alm), Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (alm), Drs. A. Yakub, M.Si Ph.D, Dr. Muhammad Saad, MA, , Andi Ali armunanto, S.IP, M.Si, Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si sekaligus pembimbing I penulis, Andi Naharuddin, S.IP, M.Si sekaligus pembimbing II penulis, Dr. Ariana Yunus, M.Si, Imran, S.IP,



M.Si, Endang Sari, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Haryanto S.IP M.A yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh pegawai dan staf Jurusan Ilmu Politik dan pemerintahan, khususnya Pak Aditya, dan Pak Hamzah, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
7. Kepada seluruh narasumber / informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data penulis butuhkan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudariku "**Amandemen 2014**", Fendi, Syarfan, Guntur, Ganang, Al Mu'min, Yusran, Yayat, Ilham, Dirwan, Gaus, Sufri, Yusuf, Arno, Ram, Ichwan, Ade, Fida, Finny, Ica, Uci, Iyha, Ona, Citra, Fitri, Rahmi, Tuti, Yunita, There, Afra, Ana yang banyak membantu dan memberikan support kepada penulis.
9. Seluruh keluarga besar HIMAPOL FISIP UNHAS terkhusus untuk kanda-kanda angkatan 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, serta adik-adik angkatan 2015, 2016, 2017, 2018, yang telah menjadi tempat berproses dan berorganisasi selama ini.
10. Kepada teman-teman KKN Gel.96 Kecamatan Balusu Kabupaten Barru terkhusus teman se-posko di Desa Binuang Nirmala (Alm), Febri, Ari, Ali, Kak Ulla

11. Kepada sahabat-sahabatku Thamara Annisa, Fira Permata, Fauziah Intan, dan Anasya Fadillah.

12. Kepada sahabat-sahabat dari kecil Astriyani Ramlan, Rafika Olinia, Aridah Hikmah, dan Laksmita

Akhir kata penulis menyadari di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan, dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan

Makassar, 20 Juni 2021

Rini Anggriani Syukri



## ABSTRAK

**Rini Anggriani Syukri (E11114505), dengan judul “Garis Keturunan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”. Dibimbing oleh Gustiana A. Kambo sebagai pembimbing I dan Andi Naharuddin sebagai Pembimbing II**

Kontestasi politik lokal dalam pilkades di Desa selama ini ikatan garis keturunan atau kekerabatan masih sangat kental. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan kebertahanan garis keturunan H. Toba mampu bertahan dalam pemilihan kepala desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

Tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Dimana lokasi ini telah melaksanakan lima kali pemilihan kepala desa setelah pemekeran dari Desa Madello. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sasaran penelitian adalah informasi dan referensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini yaitu Wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerabatan Desa Binuang Kabupaten Barru dimana kekuasaan Kepala Desa dipegang garis keturunan bangsawan. Eksistensi kepemimpinan kalangan bangsawan di Desa binuang kecamatan balusu kabupaten barru disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya ialah kekuatan jaringan keluarga diantara para golongan bangsawan kemudian kuatnya legitimasi kekuasaan dari masyarakat yang menganggap bahwa keturunan bangsawan memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin, selain itu juga ditopang oleh modal sosial dan modal ekonomi yang dimiliki oleh para bangsawan yang mampu mengubah ataupun mempengaruhi preferensi pemilih di desa tersebut dengan tiga aspek ini menguatkan posisi kaum bangsawan terkhusus keturunan H. Toba dalam kepemimpinannya di Desa Binuang Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

***Kata Kunci*** : *Pilkades, Kekerabatan, Legitimasi Kekuasaan, Modal Sosial.*

## ABSTRACT

**Rini Anggriani Syukri (E11114505), with the title "Lineage in the Election of Village Heads in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency". Supervised by Gustiana A. Kambo as supervisor I and Andi Naharuddin as Advisor II**

The local political contestation in the village head election so far has been very strong lineage or kinship ties. For this reason, the purpose of this study was to analyze and describe the survival of the H. Toba lineage that was able to survive in the village head election in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency.

The type of research used is descriptive research type. The approach used in this research is a qualitative method. Location The research was conducted in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. Where this location has held five village head elections after the expansion of Madello Village. This research is a field research and the research target is information and reference. Data collection techniques used by this researcher are interviews and documentation.

The results showed that the form of kinship in Binuang Village, Barru Regency, where the power of the Village Head was held by the lineage of nobility. The existence of leadership among the nobility in Binuang Village, Balusu Sub-district, Barru Regency is caused by several aspects including the strength of the family network among the nobles then the strong legitimacy of power from the community who considers that the descendants of the nobility have the ability and skills to lead, besides that it is also supported by social and financial capital. economic capital owned by the nobles who were able to change or influence the preferences of voters in the village with these three aspects strengthened the position of the nobility, especially the descendants of H. Toba in their leadership in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency

**Keywords:** *Pilkades, Kinship, Legitimacy, Power, Social Capital.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penulisan .....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Sistem Kekerabatan Berdasarkan Garis Keturunan .....	9
2.1.1 Bentuk-Bentuk Sistem Kekeluargaan .....	14
2.1.2 Dinamika dan Perkembangan Politik Kekerabatan.....	17
2.2 Perilaku Memilih .....	21
2.3 Patron Klien .....	28
2.4 Kerangka Pemikiran .....	36
2.5 Skema Pikir .....	38

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi Penelitian .....	39
3.2 Tipe Dan Dasar Penelitian .....	39

3.3 Sumber Data .....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.4.1 Wawancara ( <i>Interview</i> ) .....	41
3.4.2 Dokumentasi .....	43
3.5 Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Desa Binuang.....	47
4.2 Kelembagaan.....	48
4.3 Keluarga H. Toba Dalam Konstalasi Sosial Politik di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru .....	50
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Eksistensi Garis Keturunan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru .....	54
5.1.1 Jaringan Keluarga .....	55
5.1.2 Kepercayaan Politik di Masyarakat .....	58
5.1.3 Patron Klien Melalui Kepemilikan Modal Ekonomi dan Modal Sosial .....	69
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	72
6.2 Saran .....	73
Daftar Pustaka .....	75
Lampiran-Lampiran.....	78

## DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1	Lembaga Kemasyarakatan di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.....	48
2	Lembaga Adat di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi yang pada hakikatnya adalah kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, partisipasi rakyat seharusnya tidak terhenti hanya didalam bilik suara. Lebih dari itu, dalam setiap tahapan kehidupan bernegara dalam skala apa pun, rakyat memiliki hak dan juga kewajiban untuk berpartisipasi. Demokrasi juga diartikan sebagai kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi pemimpin di suatu negara bahkan ditingkat Desa sekalipun.

Demokrasi dalam arena desa sendiri merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintahan desa (Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada ditangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan di desa, bukan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Amanulloh Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta. Hal 10

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 34 menyebutkan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Begitu juga disebutkan dalam pasal 38, calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji. Kepala desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak, kecuali calon tunggal yang harus mendapat suara 50% + 1 dari pemilih yang menggunakan hak memilih dalam pemilihan kepala desa.<sup>2</sup>

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat desa. Pilkades dipahami sebagai ajang pertarungan para elit. Fakta menunjukkan keberadaan calon kepala desa (cakades) masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan elit desa. Pemilihan kepala desa menjunjung dan dilandasi oleh nilai-nilai gotong royong dan asaz kekeluargaan dengan dilakukan oleh masyarakat desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Pemilihan kepala desa ini merupakan bentuk dari demokrasi langsung dan murni dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses.

---

<sup>2</sup> Yuleni Ira. 2016. Skripsi: *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*. Diakses pada tanggal 16 Januari 2018



Rangkaian pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa diawali dari tahap pencalonan, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan. Namun pada kenyataannya rakyat yang sangat apatis membuat tingkat partisipatif masyarakat menurun. Apatis masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik. Mereka adalah para elit desa yang ingin melanggengkan kekayaan dan kekuasaan agar tetap jatuh kepada garis keluarga. Sehingga faktor menunjukkan keberadaan calon kepala desa masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan desa.

Dalam sistem pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan kekuasaan. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye, pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa dan faktor-faktor tertentu yang membuat calon terpilih, seperti keluarga. Pertarungan antar elit desa dalam pemilihan kepala desa mengandalkan kekuatan politik mereka sendiri untuk meraih dukungan masyarakat desa. Calon kepala desa harus memiliki berbagai keunggulan sumber daya atau kekuatan agar para pemilih yakin bahwa mereka layak menjadi kepala desa. Bagi keluarganya tantangan menjadi

kompleks, sebab selain harus memiliki sumber daya atau kekuatan, masa kepemimpinan sebelumnya biasanya dijadikan tolak ukur apakah mereka masih layak dipilih atau tidak.

Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai contohnya yang juga memiliki hubungan garis keturunan dengan pemimpin sebelumnya yaitu ibu eni menjadi kepala desa yang hanya lulusan SLTA. Ibu Eni mempunyai latar belakang darah keturunan pendiri punden desa, Ayah beliau yang bernama H.Utsman Ali pernah menjabat yakni periode tahun 1970-1980, sedangkan suaminya Ashori Sujoko beliau menjabat Kepala Desa periode tahun 1980-2000 pada masa H.Utsman Ali ayah beliau merupakan dimata masyarakat dipandang tidak baik karena tidak terlaksananya pembangunan jembatan tol penghubung antara Desa Bungurasih dengan Desa Ketegan.

Pada masa suami beliau sempat ada Pemilihan Kepala Desa yang di sebut "*Bombong Kosong*" yakni tanpa adanya pesaing, dimana semua masyarakat menyukai kepemimpinan suami beliau yang terkenal sopan, dermawan, perhatian terhadap warga. Kerabat beliau Krisna Sugandi 2000-2010 dimana era kepemimpinannya terdapat banyak permasalahan termasuk uang pembebasan lahan Tol Juanda, penjualan irigasi desa, pendirian tiang reklame tanpa berunding dengan warga sekitar. Akhirnya Ibu Eni menjabat tahun 2010 sampai sekarang. Melihat latar belakang calon yang hanya lulusan SLTA, artinya calon tidak memiliki pengetahuan, kemampuan dan

wawasan mengenai politik, maka akan muncul pertanyaan kenapa masyarakat memilih Ibu Eni apakah karena keturunan pendiri punden desa, atau bahkan dari suaminya.

Banyak timbul pertanyaan tentang sosok Ibu Eni, namun setelah melakukan wawancara lebih lanjut dengan tokoh masyarakat bahwasannya di Desa Bungurasih mempunyai lima wilayah warga atau dalam sebutan RW yakni dimana RW 1 Bungurasih, RW 2 Bungurasih Barat, RW 3 Bungurasih tengah mayoritas warganya masih kerabat Bu Eni. Karena banyaknya warga yang masih terikat kerabat memungkinkan kekerabatan Ibu Eni menang dalam setiap Pemilihan Kepala Desa.

Fenomena majunya calon kepala desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya dan banyak dari warganya yang merupakan kerabatnya. Kondisi sangat memprihatinkan karena hal ini menunjukkan bahwa kursi kepala desa adalah jabatan yang menguntungkan, membawa berkah, dan bisa dijadikan sarana untuk mengumpulkan kekayaan serta melanggengkan kekuasaan untuk diturunkan kepada keluarga maupun kerabat sendiri. Pilihan regenerasi model kekerabatan seperti ini jelas merupakan cermin bahwasanya masyarakat desa masih mempraktekan model demokrasi tradisional yang hanya percaya pada kemampuan yang

dimiliki calon-calon yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu.<sup>3</sup>

Di Kabupaten Barru tepatnya di Desa Binuang Kecamatan Balusu yang merupakan hasil desa pemekaran dari Desa Madello terjadi pemilihan kepala desa yang menggunakan faktor garis keturunan sebagai kekuatan politiknya. Selama pemekaran desa, H. Mannahali Dg. Matteko yang menjadi Pelaksana Tugas (Plt) selama satu tahun. Setelah selesai pemekaran desa, dilaksanakan pemilihan kepala desa dan H. Mannahali Dg. Mattako mencalonkan menjadi kepala desa, yang menjadi lawannya ialah Akhmad R. Dan dimenangkan oleh H. Mannahali Dg. Mattako dengan masa jabatan dari tahun 1995-2004.

Pemilihan kepala desa berikutnya, H. Mannahali Dg. Mattako mencalonkan lagi untuk menjadi kepala desa. Dan yang menjadi lawannya ialah H. Andi Mannahau. Hasil dari pemilihan ini dimenangkan oleh H. Andi Mannahau dengan masa jabatan 2005-2011. Pemilihan kepala desa yang berikutnya lagi, H. Andi Mannahau mencalonkan kembali menjadi kepala desa, yang menjadi lawannya ialah Muzakkar. Dan di menangkan oleh H. Andi Mannahau untuk kedua kalinya dengan masa jabatan 2011-2017.

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang di ikuti 2 calon yaitu H. Andi Hendra yang merupakan keluarga dari H. Andi

---

<sup>3</sup> Faisal. 2018. Skripsi: *Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bungurasih Tahun 2016*. Diakses pada tanggal 16 Maret 2018

Mannahau dan lawannya ialah Hj. Hasnawati yang merupakan istri dari H. Mannahali Dg. Mattako. Hasil dari pemilihan ini dimenangkan oleh H. Andi Hendra yang menjabat sebagai kepala desa sampai sekarang.

Kontestasi politik lokal dalam pilkades di Desa Binuang selama ini ikatan garis keturunan atau kekerabatan masih sangat kental seperti keluarga H. Toba yang merupakan kakek dari H. Andi Hendra yang masih berkerabat dengan H. Andi Mannahau yang telah memenangkan pemilihan kepala desa selama 3 periode. Pemilihan kepala desa di Desa Binuang masih dikuasi oleh segelintir elit desa yang memperkecil kesempatan pesaing untuk menang dalam pemilihan kepala desa meskipun H. Andi Hendra sempat melaporkan H. Andi Mannahau ke KPK tetapi masyarakat disana tetap memilih H. Andi Mannahau sebagai kepala desa karena telah membangun Desa Binuang di bidang pertanian dan walaupun mereka pernah berseteruh dan tidak saling mendukung tetapi masyarakat tidak mempersoalkan masalah perpecahan keluarga mereka, mereka tetap dijadikan pemimpin dalam pilkades.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti **“Garis keturunan dalam pemilihan kepala desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut:  
Bagaimana garis keturunan H. Toba mampu bertahan dalam pemilihan kepala desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam tulisan penulis ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan kebertahanan garis keturunan H. Toba mampu bertahan dalam pemilihan kepala desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

### **1.4 Manfaat penelitian**

#### 1.4.1 Manfaat akademis

- a. Memberikan masukan terhadap studi faktor garis keturunan dalam pemilihan kepala desa
- b. Sebagai bahan bacaan dan literature tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

- a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat tentang faktor garis keturunan dalam pemilihan kepala desa
- b. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan konsep yang disesuaikan dengan topik, judul, dan fokus penelitian. Konsep-konsep ini menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam pelaksanaan studi dan kajian. Konsep-konsep yang dibahas adalah:

#### **2.1 Sistem Keekerabatan Berdasarkan Garis Keturunan**

Dalam bahasa Inggris kekerabatan disebut dengan istilah kinship. Keekerabatan secara bahasa menunjuk pada “hubungan darah”, yang dimaksud dengan kerabat adalah mereka yang bertalian berdasarkan ikatan “darah” dengan kita.<sup>4</sup> Dalam pernyataan ini hubungan antara orang tua dan anak merupakan ikatan pokok keekerabatan.

Menurut definisi Morgan, keekerabatan mengatur keadaan *socitas*, dan yang kedua mengatur *civitas*. Atau menggunakan terminologi yang sering digunakan sekarang ini yang pertama merujuk pada struktur-struktur respositas dan kedua merujuk pada dikatomi yang jelas. Dalam kasus ini, ada dikatomi yang jelas yang dikatomi inipun tampil dalam teori marxis dimana masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas-komunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangkan ikatan-ikatan hubungan darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam

---

<sup>4</sup> Roger M. Keesing. *Antropologi Budaya*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980). hal 212.



tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga. Wilayah maskulin dengan wilayah feminim, dan lain sebagainya.

Jauh dari memandang kekerabatan itu sebagai pengertian yang saling meniadakan, antropologi politik telah memperlihatkan ikatan-ikatan kompleks antara dua sistem itu, menganalisisnya, serta menghubungkan teori-teori mengenai hubungan hubungan itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan. Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk membedakan antara hubungan kekerabatan dan kekuasaan dengan menimbang begitu eratnya hubungan antara keduanya. Dibanyak masyarakat-masyarakat primitif misalnya banyak ditemui adanya kekuasaan yang selalu disandingkan dengan kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dari kreteria masyarakat primitif khususnya dalam keanggotaan suatu komunitas politik. Seperti halnya metode keturunan baik dari garis keturunan *patrineal* maupun *matrilineal* terutama mengkondisikan kewarnegaraan dalam masyarakat-masyarakatnya serta didasarkan atas hubungan-hubungan dan kelompok-kelompok yang disusunnya secara tajam yang akan berbeda dengan kekerabatan dalam pengertian ketetapannya. Sedangkan dalam masyarakat segmenter yang menarik sebuah sistem perbudakan domestik, status para budaknya didefinisikan terutama dalam pengertian pengucilan dari sebuah garis

keturunan dan mengambil bagian sebagai kontrol atas kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Levi-Strauss paling sedikit ada tiga sebab seseorang bisa disebut kerabat, yaitu kerabat karena hubungan darah, kerabat karena hubungan kawin, dan kerabat karena hubungan keturunan. Kerabat karena hubungan darah yaitu kerabat karena adanya hubungan antara individu dengan saudara-saudara sekandungnya yang berupa hubungan darah. Hubungan kerabat karena perkawinan adalah hubungan individu dengan pasangannya yang berupa hubungan karena perkawinan, yang menghubungkan kelompok saudara sekandungnya sendiri dengan saudara sekandung pasangannya. Sedangkan hubungan kekerabatan karena keturunan adalah hubungan individu dengan anak-anak mereka, yang berupa hubungan keturunan.<sup>6</sup>

Kekerabatan biasanya selalu berdampingan dengan kekuasaan sehingga kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun para ilmuan politik tidak ada yang sepakat mengenai perumusan pengertian kekuasaan. Bahkan beberapa diantaranya menyarankan agar konsep kekuasaan ditinggalkan dengan alasan bersifat kabur dan selalu berkonotasi emosional. Namun tampaknya politik tanpa kekuasaan, apalagi sekarang fenomena politik kekerabatan ibarat agama

---

<sup>5</sup> Geoges Balander. *Antropology Politik*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo persada,1996). Hal 65

<sup>6</sup> Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi 1*. (Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press). 1987. hal 214.

tanpa moral. Karena modern ini banyak para aktor politik yang selalu melibatkan keluarganya untuk berkecimbung juga dalam dunia politik hal ini terlihat diberbagai daerah menjelang Pemilihan kepala daerah yang serentak dilakukan pada akhir-akhir ini<sup>7</sup>

Politik kekerabatan atau keluarga politik memang dapat dijumpai di hampir semua negara. Di Amerika Serikat misalnya keluarga Kennedy masih dianggap sebagai keluarga politik berpengaruh atau dihormati, baik di Massachussetts maupun ditingkat negara federal. Di Indonesia politik kekerabatan identik dengan kekuasaan di keluarga atau di kerabat politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Politik Indonesia akan seperti yang terjadi di Filipina dimana Bossism berbasis teritorial menguasai politik. Negara dijalankan oleh segelintir elit dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun demokrasi yang sehat dan substansi<sup>8</sup>

Politik kekerabatan dapat diartikan sebagai bentuk upaya bersama berdasarkan ikatan keluarga, kerabat dan kroninya utk memperoleh, melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan. Upaya bersama itu

---

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta:Grasindo,2010). hal 71.

<sup>8</sup> Harjanto, Niko. 2011. Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik. Vol. 40 No.2. Diakses pada tanggal 10 Maret 2018

merupakan strategi politik agar kekuasaan tidak berpindah pada orang/golongan lain sebagai rival politiknya, melainkan tetap berada pada genggamannya keluarga dan kerabatnya. Tegasnya setelah masa jabatan seseorang habis, segera akan digantikan oleh isteri, anak, adik, sepupu, atau kerabat lainnya. Kekuasaan yang secara politis diwariskan melalui satu garis keturunan atau dengan sistem kekeluargaan, cenderung mengarah pada adanya tujuan untuk berbagi kekuasaan atau jabatan dalam struktur pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan milik bersama, milik keluarga, milik kerabat atau milik partai. Oleh karena politik jenis ini cenderung berurusan dengan kepentingan pembagian jabatan dan harta bersama, maka kemudian banyak orang menyebutnya sebagai politik gono gini.

Kekerabatan berdasarkan garis keturunan sama seperti kekerabatan yang terjalin karena adanya hubungan sedarah. Kekerabatan berdasarkan garis keturunan ini dilihat dari keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat. Lain halnya dengan kekerabatan berdasarkan perkawinan yang merupakan kekerabatan yang terjalin setelah terjadinya perkawinan. Dalam menentukan kerabat berdasarkan perkawinan dapat dilihat dari garis keturunan terlebih dahulu. Masyarakat itu memakai garis keturunan ibu atau matrilineal maka pihak ayah yang menjadi kerabat berdasarkan garis perkawinan.

Namun, masyarakat yang memakai garis keturunan ayah maka pihak ibu yang menjadi kerabat berdasarkan perkawinan.<sup>9</sup>

### **2.1.1 Bentuk- Bentuk Sistem Kekeluargaan**

Bentuk kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan. Sedangkan dalam biologi istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai "hubungan dekat" daripada "keturunan" (juga disebut "konsanguitas").

Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti ayah adalah seseorang yang memiliki anak, atau mewakili secara absolut seperti perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak. Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban di antara orang-orang terkait yang lebih kuat daripada dengan orang asing, seperti

---

<sup>9</sup> Nika Sari, Ermanto, M. Ismail Nst. 2013. *Sistem Kata Sapaan Kekerabatan Dalam Bahasa Melayu Di Kepenghuluan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*. Vol. 1 No.2. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

bakti anak. Pada umumnya dikenal 3 (tiga) bentuk sistem keturunan, yaitu: 1. Matrilineal 2. Patrilineal 3. Parental<sup>10</sup>. Walaupun ada variasi dari ketiga bentuk sistem keturunan tersebut, misalnya: Alternierend patrilineal ordenning atau alternating patrilineal sistem, seperti di Rejang Lebong Lampung Papadon. Demikian juga ada double unilateral sistem seperti di Timor. Tetapi tidak begitu menonjol dan tidak akan dibicarakan dalam tulisan ini. Di bawah ini akan dibahas tentang ketiga bentuk sistem kekeluargaan yang dikemukakan di atas.

#### 1. Matrilineal

Yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu mater (bahasa Latin) yang berarti "ibu", dan linea (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "matrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu". Sistem unilateral matrilineal yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, antara lain terdapat di Minangkabau, Enggano dan Timor. Setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ibu, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu, dan kepada ibunya dari ibunya itu sampai kepada seorang wanita

---

<sup>10</sup>Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal 5.

yang dianggap sebagai nenek moyangnya di mana clan ibunya berada dan mereka menganggap satu clan (suku) yaitu suku ibunya.<sup>11</sup>

## 2. Patrilineal

Adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan patriarkhat atau patriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Patrilineal berasal dari dua kata, yaitu pater (bahasa Latin) yang berarti "ayah", dan linea (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "patrilineal" berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sistem unilateral patrilineal seperti terdapat di Batak, Gayo, Lampung, Buru, Seram dan lain-lain. Di mana pada pokoknya adalah suatu sistem yang menarik garis keturunan dengan menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayah dari ayah. Dalam sistem patrilineal yang murni seperti di tanah Batak, atau di mana orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya tergantung pada perkawinan orang tuanya tersebut.<sup>12</sup>

## 3. Parental

Sistem parental ialah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada ayahnya. Sistem kekeluargaan atau keturunan tersebut

---

<sup>11</sup> Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995),109.

<sup>12</sup> Eman Suparman. Op.cit. 6.



pada prinsipnya menimbulkan dan dipertahankan dengan adanya sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat itu. Benteng untuk mempertahankan sistem kekeluargaan matrilineal atau patrilineal tersebut disebabkan bentuk perkawinan yang eksogami, di mana terlarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang se-clan. Atau larangan perkawinan sepupu (cross-cousins) dan paralelcousins. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau misalnya perkawinan sepupu yang sangat dilarang, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ibu mereka masing-masing bersaudara kandung atau saudara seibu. Akan tetapi larangan itu dapat dilangkahi dengan membayar denda, karena dianggap perkawinan pecah periuk. Maksudnya antara mereka yang satu clan tidak boleh melakukan perkawinan, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis magis religius dari suku (clan), sehingga dinetralisir dengan memberikan benda magis kepada kepala suku atau dalam bentuk uang, atau menyembelih seekor hewan sebagai korban.

### **2.1.2 Dinamika dan Perkembangan politik Kekerabatan**

Studi mengenai dinasti politik telah banyak dilakukan para ilmuwan politik di berbagai negara. Beberapa peneliti yang tulisannya banyak dirujuk antara lain Pablo Querubin, Mark R. Thompson, Ernesto Dal Bo, Jason Snyder, Alfred W. McCoy, Donn M. Kurtz, Yasushi Asako, dan Stephen Hess.

Pada umumnya posisi kajian mengenai isu dinasti politik ini berada dalam konteks perbincangan mengenai politik kekerabatan (keluarga) sebagaimana

dapat dibaca dalam cara bagaimana para ahli itu mendefinisikan dinasti politik. Pablo Querubin mendefinisikan dinasti politik sebagai sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan dalam area geografis tertentu. Mark R. Thompson menjelaskan dinasti politik hanya sebagai jenis lain dari transisi (peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan anggota keluarga. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan Yasushi Asako yang mendefinisikan dinasti politik secara sederhana sebagai sekelompok politisi yang mewarisi jabatan publik dari salah satu anggota keluarga mereka.

Kebangkitan dinasti politik, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak hasil studi yang dilakukan para ahli diberbagai negara memang memiliki hubungan sangat erat dengan kepentingan keluarga atau politik kekerabatan. Kepentingan keluarga kerap, jika tidak selalu, menjadi basis muasal pertumbuhan, perkembangan dan perluasan dinasti politik dalam suatu sistim politik demokrasi. Dalam tradisi politik kekerabatan anggota keluarga yang sudah menjadi penguasa atau menduduki jabatan public pada umumnya akan melakukan praktik nepotisme dengan memberikan berbagai perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau kerabatnya, bukan untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya, melainkan dalam rangka membangun dan memperkuat jejaring kekuasannya. Dari sinilah kemudian embrio dinasti politik itu muncul.

Studi Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis dikemukakan, bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu didasarkan pada 4 (empat) argumentasi, yakni: (1) Kepercayaan (*trusty*), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan; (2) Kesetiaan (*loyalty*), bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain; (3) Solidaritas (*solidarity*), artinya kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan kerabat; (4) Proteksi (*protection*), hal ini terkait dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki keluarga ketimbang orang lain. Secara teoritik praktik dinasti politik menimbulkan berbagai ancaman problematis dalam kehidupan politik di aras lokal.

Kerangka konsolidasi demokrasi lokal, praktik dinasti politik mempersempit ruang partisipasi public sekaligus menegasikan salah satu prinsip dasar demokrasi, yakni kesetaraan politik. Selain itu, dinasti politik juga hanya akan memperkokoh gejala oligarkis di daerah yang berpotensi melemahkan mekanisme *check and balance* karena jabatan-jabatan politik

dikuasai oleh satu keluarga. Dalam pandangan Amich Alhumami, peneliti sosial di University of Sussex Inggris politik kekerabatan atau dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Sebab, proses rekrutmen didasarkan pada sentimen kekeluargaan, bukan kompetensi. Menurutnya, jika terus berlanjut, gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar membangun sistem demokrasi modern. Dominasi kekuasaan oleh sekelompok elit lokal atau keluarga yang demikian itu pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan (korupsi) kekuasaan politik maupun ekonomi.

Senada dengan pandangan di atas, merujuk pada kajian John T. Sidel tentang local bossism misalnya, dapat disimpulkan bahwa kehadiran model-model oligarki, personalisme dan klientilisme yang kesemuanya menjadi ruh (esensi) dari karakteristik dinasti politik telah menghambat proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Dalam bukunya yang lain, Sidel bahkan menuding praktik dinasti sebagai pihak paling bertanggung jawab atas maraknya gejala personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik. Proses pengambilan keputusan tak lagi didasarkan pada proses rasionalitas instrumental, tetapi didasarkan pada keputusan individual dari aktor-aktor dinasti yang berkuasa. Pelembagaan partai politik juga tersumbat karena asas meritokrasi ditundukkan oleh hubungan darah dan hubungan keluarga.

Kemudian dalam konteks ekonomi lokal, praktik dinasti politik juga dapat melahirkan kapitalisme klientilistik sebagai bagian dari kronisme, dimana pelaku investasi ekonomi tidak serta merta bebas melakukan aktivitasnya karena senantiasa dimintai upeti oleh kerabat kepala daerah. Sementara Leo Agustino melihat, bahwa praktik dinasti politik memberi pengaruh buruk pada pembangunan sosial-politik dan sosial-ekonomi, karena peluang politik dan ekonomi setiap warga negara menjadi amat terbatas sebab dimonopoli oleh penguasa serta keluarga dan para kerabatnya.<sup>13</sup>

Politik dinasti terjadi apabila seseorang politisi mempunyai hubungan-hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya. Hal ini senada dengan pengertian dari Pablo Querobin yang menyatakan bahwa politik kekerabatan bentuk khusus dari upaya elit untuk mempertahankan kekuasaan yang satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik. Politik kekerabatan cenderung rekrutmen berdasarkan kepada pertimbangan kekerabatan bukan pada aspek kualifikasi kandidat.<sup>14</sup> Sudah menjadi rahasia umum jika di Indonesia.

## **2.2 Perilaku Memilih**

Perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : “aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilihan

---

<sup>13</sup> Jurnal Politik Indonesia “Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah” Dipublikasikan 15 Juli 2017

<sup>14</sup> Jurnal “Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan” Diakses 02 Oktober 2018

umum (pilkada secara langsung). Bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.<sup>15</sup>

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat *loyalitas* pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Perilaku pemilih juga sarat dengan *ideology* antara pemilih dengan partai politik atau konsestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideology yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideology sama dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideology yang berseberangan dengan mereka.<sup>16</sup>

Di dalam mengambil keputusannya, maka masyarakat diperkirakan mempunyai tolok ukur yang tradisional yang meliputi 3 aspek penting, yakni:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Arbi Sanit, “Partai, Pemilu dan Demokrasi”. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997) hal 170

<sup>16</sup> Asfar Muhammad, “Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004”. (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006) hal 137

<sup>17</sup> Joko J. Prihatmoko, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung”. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) hal 50

- Identifikasi terhadap partai
- Isu yang diusung partai atau calon, dan
- Penampilan, gaya dan kepribadian calon

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu:<sup>18</sup>

#### A) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika dan pendidikan Eropa. Karena itu, dia disebut sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku pemilih masyarakat Inggris, menyebutkan model ini sebagai *social determinism approach*.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dsb) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dsb) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (lelaki-perempuan), agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi

---

<sup>18</sup> Asfar Muhammad, "Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004". (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006,) hal 137-144

keagamaan, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, yang merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.<sup>19</sup>

#### B) Pendekatan Psikologis

Bila pendekatan sosiologis berkembang di Amerika Serikat dan berasal dari Eropa Barat, maka pendekatan psikologis merupakan fenomena Amerika Serikat karena dikembangkan sepenuhnya oleh Amerika Serikat melalui *Survey Research Centre* di Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut Mazhab Michigan. Pelopor utama pendekatan ini adalah Angus Campbell.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang. Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya.

Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 137-144



menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.<sup>20</sup>

### C) Pendekatan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu mereka menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik pun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, di mana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya.

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 137-144

Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan berbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih. Namun, apabila partai ataupun calon presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih. Oleh karena itu, pada Pemilu 2008 sistem pemilihan diubah, dan mempersilahkan rakyat untuk ikut andil memilih pasangan presiden yang mereka anggap dapat memberikan harapan. Layaknya seorang pembeli di pasar, pemilih melakukan pilihan dengan cermat bukan hanya dalam memilih presiden tetapi juga anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>21</sup>

Tripologi Pemilih antara lain sebagai berikut :<sup>22</sup>

a) Pemilih Rasional

Pemilih dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang diberikan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang

---

<sup>21</sup> Ibid, hal 137-144

<sup>22</sup> Ibid, hal 144-149

terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.<sup>23</sup>

#### b) Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu *pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan pemilu baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan dibuat.<sup>24</sup>

#### c) Pemilih Tradisional

Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi,

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 144-149

<sup>24</sup> Ibid, hal 144-149

kesejahteraan, pendidikan dan lainnya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.<sup>25</sup>

### **2.3 Teori Patron Klien**

Pemilihan Kepala Desa membentuk adanya power bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Setelah pemilihan kepala desa, figur yang terpilih dan menjabat kemudian membentuk sebuah karakter yang disebut sebagai patron. Dalam tatanan pemerintahan meskipun skala Kepala desa melibatkan adanya struktur yang terdiri dari atasan hingga bawahan maka peristiwa ini secara alami membentuk sebuah patron klien.

Kata patron berasal dari bahasa latin pater yang berarti bapak, dari pater berubah menjadi patris dan patronis yang berarti bangsawan atau patricius yang berarti seseorang yang dianggap pelindung sejumlah rakyat jelata yang menjadi pengikutnya.<sup>26</sup>

Sebaliknya klien atau client berasal dari kata cliens yang berarti pengikut. Mereka ini adalah orang-orang merdeka yang sejak awal atau bekas budak yang dimerdekakan. Mereka menggantungkan diri pada patron,

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 144-149

<sup>26</sup> Ng.Philipus, M.S Dr. Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik cetakan ke-4* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2011), Hal. 41

bahkan kadang menggunakan nama paham sang patron. Patron berasal dari bahasa latin yaitu "patronas" atau yang kita kenal dengan arti bangsawan, sedangkan klien berasal dari kata "cliens" yang berarti pengikut. Dalam bahasa Spanyol, istilah "patron" secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar. Sedangkan "klien" berarti bawahan atau orang yang diperintah Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai pemahaman patron klien, berikut ini definisi yang dikemukakan oleh Lande dan Scott. Menurut Lande, hubungan patron klien merupakan aliansi dua pribadi yang tidak sama, kekuasaan status atau sumber daya yang masing-masing menemukan suatu hal yang berguna sebagai anggota unggul seperti aliansi yang disebut pelindung dan kliennya disebut inferior.

Menurut Scott bahwa hubungan patron klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien) yang pada gilirannya

membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.<sup>27</sup>

James Scott mengatakan bahwa patron klien merupakan hubungan spesial antara dua pihak di mana pihak memiliki status ekonomi lebih tinggi menggunakan pengaruhnya dan resourcesnya untuk melindungi dan memberi manfaat pada pihak yang status sosial ekonominya lebih rendah. Dalam hubungan ini, imbalan yang diberikan klien dalam bentuk bantuan atau dukungan termasuk pelayanan kepada patron.<sup>28</sup>

Perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien: a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja. b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi. Peter M. Blau mengatakan hubungan patron-klien lebih merupakan hubungan pertukaran (Exchange relationship) yaitu bahwa: a. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka. b. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit. c. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (alam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial

---

<sup>27</sup> Heddy Shri Ahimsa. *Patron & Klien di Sulawesi selatan*. (Yogyakarta : Kepel Pres, 2007), hal. 4

<sup>28</sup> Ng.Philipus, M.S. Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik cetakan ke-4* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) Hal. 42

yang lebih besar). d. Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan/penghargaan dan kepatuhan.<sup>29</sup>

Ciri-ciri hubungan patron-klien:

1. Adanya ketidakeimbangan status antara patron dan klien.
2. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari klien.
3. Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan klien dari patro yang menyebabkan adanya rasa utang budi klien pada patron.
4. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan.

Menurut Peter M. Blau sifat hubungan patron-klien adalah sebagai berikut:

- a) Asas resiprositas
- b) In equal
- c) Ada force dan coercion
- d) Ikatan akrab atas dasar saling percaya.

Sedangkan menurut James Scott ada tiga sifat hubungan patronklien:

- a) Basic i equity

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 43

- b) Face to face character
- c) Diffuce flexibility (meliputi semua segi kehidupan)

Ada tiga jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patron, yaitu:

1. Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron di ladang, sawah atau usaha lainnya.
2. Klien dapat menyerahkan bahan makanan hasil ladangnya buat patron atau pelayan rumah tangga
3. Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia menjadi kaki tangan patron.<sup>30</sup>

Struktur sosial masyarakat nelayan umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron klien. Kuatnya ikatan patron klien merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh resiko. Menurut Scott (1993:7-8) Patron-klien merupakan salah satu bentuk pertukaran hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya, bentuk ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hubungan dari ikatan diadik (dua orang) dan melibatkan suatu persahabatan instrumental. Dimana patron memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan dapat menggunakan pengaruh serta sumberdaya yang dimiliki untuk memberikan suatu perlindungan dan keuntungankeuntungan bagi salah satu pihak dengan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hal 44



status lebih rendah yaitu klien. Ada masanya dimana klien akan membalas kebaikan yang diberikan oleh patron dengan bentuk menawarkan bantuan baik secara garis pekerjaan atau jasa pribadi kepada patron<sup>31</sup>.

Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti, seorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang, dan pengaruh. Sedangkan klien yang artinya bawahan atau orang yang diperintah dan disuruh. Pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah, dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi

Menurut Scott (1981: 191) dalam Kausar, dkk (2011) bahwa ciri-ciri hubungan patron-klien yaitu:

1. Adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang
2. Adanya hubungan yang saling memberikan keuntungan satu sama lain, walaupun terkadang dalam porsi yang tidak seimbang.
3. Adanya hubungan loyalitas seperti kesetiaan dan kepatuhan.

---

<sup>31</sup> Vicky Anilta, Skripsi : *"Dinamika Hubungan Patron Klien Nelayan Dipantai Utara Jawa Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan"* ( Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) Hal. 15

4. Adanya hubungan antar individu yang bersifat langsung secara intensif antar patron dengan klien. Hubungan tersebut terjadi tidak hanya bermotifkan pada keuntungan namun ada unsur perasaan dalam hubungan yang sifatnya pribadi.<sup>32</sup>

Arus hubungan yang terjadi antara patron ke klien (Scott, 1993: 9) adalah :

1. Penghidupan subsistensi dasar didaerah agrarian, jasa utama berupa pemberian pekerjaan tetap atau tanah untuk bercocok tanam dan bisa juga mencakup penyediaan benih, peralatan, jasa pemasaran, nasihat.
2. Jaminan krisis subsistensi. Patron biasanya diharapkan untuk memberi pinjaman pada saat bencana ekonomi, membantu dalam keadaan sakit atau kecelakaan, atau membantu pada waktu panen kecil ataupun pada saat panen gagal. Patron sering menjadi dasar subsistensi bagi kliennya dengan menyerap kerugian-kerugian (dalam pertanian atau pendapatan) yang akan merusak kehidupan klien jika tidak dilakukan oleh patron.
3. Perlindungan. Perlindungan bisa berarti memelihara sekelompok orang bersenjata atau janji untuk membalaskan

---

<sup>32</sup> Ibid., Hal. 15-16

dendam untuk klien. Ini berarti melindungi klien dari bahaya pribadi (bandit, musuh pribadi) maupun dari bahaya umum (tentara, penjahat luar, pengadilan, pemungutan pajak).

4. Makelar dan Pengaruh. Jika patron melindungi klien atas perusakan yang berasal dari luar, ia juga menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menarik hadiah dari luar untuk kepentingan kliennya. Perlindungan merupakan peran defensifnya dalam menghadapi dunia luar, kemakelaran adalah peran agresifnya.
5. Jasa Patron Kolektif. Secara internal, patron merupakan kelompok yang dapat melakukan fungsi ekonomi secara kolektif dan dapat mengelola serta memberikan sumbangan ataupun keringanan, dengan menyumbangkan tanah untuk kegunaan kolektif. Disisi lain patron juga dapat memberikan dukungan ataupun bantuan untuk sarana-sarana umum di daerah sekitar patron seperti pembangunan sekolah, mendukung perbaikan jalanan, dan terkadang juga menyponsori acara desa.<sup>33</sup>

Mengacu pada pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa pola hubungan patron klien memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Fadhilah, 2009:174).

---

<sup>33</sup> Ibid., Hal. 16-17

1. Adanya hubungan yang bersifat timbal balik. Dalam konteks ini apa yang diberikan oleh satu pihak merupakan sesuatu yang berharga pada pihak lain, dengan bantuan tersebut yang menerima merasa mempunyai kewajiban untuk membalasnya sehingga tercipta hubungan timbal balik.
2. Adanya ketidaksamaan dan ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Mencerminkan adanya perbedaan kekayaan, kekuatan, dan status masing-masing pihak. Pihak yang menempati posisi lebih tinggi merupakan pihak yang berperan sebagai patron dari pihak kedudukannya lebih rendah sebagai klien.
3. Adanya rasa ketergantungan antara patron dengan klien. Hal ini disebabkan karena ada rasa ketergantungan diantara mereka, hubungan ketergantungan ini bersifat meluas tidak hanya terkait pekerjaan melaut saja.<sup>34</sup>

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Desa Binuang yang terletak di Kabupaten Barru memiliki nilai-nilai adat dan kebudayaan yang masih dipegang teguh hingga sekarang yang sangat terlihat pada cara panggil dan perlakuan terhadap para keturunan disana. Dalam bidang politik seperti pada partisipasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, bahkan dari kandidat pencalonan pun hanya mereka para keturunan

---

<sup>34</sup> Ibid., Hal. 17-18

atau yang di sapa dengan panggilan 'Puang' yang ikut andil dan menguasai wilayah pemerintahan pada tingkat terendah tersebut.

Pada hakikatnya, demokrasi seharusnya mendorong *equitas* atau kesamaan kesempatan pada seluruh lapisan masyarakat, namun pada realita pelaksanaannya bahkan sejak diberlakukannya pemilihan langsung kepala desa hingga sekarang ini, hanya mereka keturunan yang bergelar puang yang berpartisipasi mengajukan diri sebagai kandidat hingga terpilihnya sebagai kepala desa.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengangkat tentang bagaimana garis keturunan dalam pemilihan kepala desa binuang kecamatan balusu kabupaten barru.

**2.5 Skema Pikir**

